

Lampiran 1

Berita Bernada Negatif

Hari/Tanggal : Senin, 04 September 2017

Media : Elshinta.com

Sumber : <https://elshinta.com/news/119502/2017/09/04/35-kasus-gizi-buruk-ditemukan-di-nunukan>

Judul : **35 Kasus gizi buruk ditemukan di Nunukan**



Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menemukan 35 kasus gizi buruk di Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimenggaris.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Meinstar Tololiu di Nunukan, Senin membenarkan, adanya puluhan kasus gizi buruk di Kecamatan Seimenggaris yang membutuhkan penanganan khusus.

Ke-34 kasus gizi buruk tersebut masing-masing 17 kasus yang terjadi terhadap anak pekerja perkebunan kelapa sawit PT BHumi Seimenggaris Indah (BSI) dan 17 kasus lainnya dialami masyarakat lainnya.

Sehubungan dengan kasus gizi buruk itu, Pemkab Nunukan langsung berkoordinasi dengan PT BSI agar memfasilitasi atau memudahkan pekerjajanya memeriksakan anaknya melalui posyandu yang dibentuk di desa itu.

Meinstar Tololiu mensinyalir, banyaknya kasus gizi buruk di kecamatan yang berbatasan darat dengan Negeri Sabah, Malaysia itu karena kurangnya kepedulian ibu-ibu hamil memeriksakan kesehatan.

Secara terpisah, Kepala Puskesmas Kecamatan Seimenggaris, Muhammad Adam di Seimenggaris, Selasa menyatakan, pihaknya telah menangani puluhan kasus gizi buruk di wilayah kerjanya.

Ia mengaku, langkah kongkrit yang ditempuh dengan memberikan asupan makanan tambahan kepada anak yang tertimpa penyakit kurang gizi itu dengan memeriksakan kesehatan secara rutin.

Berkat penanganan itu, maka 17 kasus yang dialami anak masyarakat umum telah dapat ditangani dengan baik sedangkan 17 kasus gizi buruk yang terjadi bagi anak pekerja perusahaan kelapa sawit PT BSI belum mampu ditangani.

Muhammad Adam menjelaskan, biaya yang dibutuhkan dalam penanganan penyakit gizi buruk sangat besar bisa mencapai Rp10 juta per orang.

Tetapi, dia menegaskan, pihaknya tetap berupaya menanganinya dengan kemampuan yang dimiliki sehingga 17 anak berhasil diselamatkan.

Penyakit gizi buruk yang terjadi di kecamatan tersebut salah satunya disebabkan ibunya kurang respek dengan kondisi kesehatannya pada hamil dan kondisi makanan yang dikonsumsi setiap hari. (Ant)

Hari/Tanggal : Kamis, 07 september 2017

Media : Kompas.com

Sumber :

<http://regional.kompas.com/read/2017/09/07/08033221/demi-sekolah-anak-anak-di-perbatasan-ini-harus-jalan-kaki-belasan-km>

Judul :

Demi Sekolah. Anak-anak di Perbatasan Harus Jalan Kaki Belasan Km



NUNUKAN, KOMPAS.com – Pagi hari baru menunjukkan pukul 06:00 Wita ketika suara tawa riang puluhan anak-anak Sekolah Dasar 001 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara berangkat sekolah dengan berjalan menyusuri sepanjang Pantai Batu Lamamapu hingga Pantai Kayu

Angin.

Pagi ini mereka bisa sedikit tertawa riang karena laut tidak sedang pasang, sehingga perjalanan menuju ke sekolah mereka bisa lebih cepat.

Berjalan kaki belasan kilometer sudah menjadi kebiasaan anak-anak Kampung Sungai Batang saat bersekolah. “Bangunnya jam 5, biasanya mandi kalau sempat ya sarapan. Jam setengah enam atau jam enam sudah berangkat,” ujar Anik (9) siswa kelas 3 SD 001 Sebatik dengan logat Malaysianya Rabu (6/9/2117).

SD 001 Sebatik berjarak sekitar 7 kilometer dari kampung Sungai Batang. Sehingga anak-anak tersebut harus berjalan sekitar 14 kilometer pulang pergi setiap mereka sekolah.

Untuk mencapai sekolah tersebut, puluhan siswa dari Kampung Sungai Batang menyusuri pantai, satu satunya akses terdekat menuju sekolah. Itupun jika air laut sedang surut. Jika air laut sedang pasang, terpaksa mereka memilih jalan setapak yang melintasi beberapa bukit.

Selain akses jalan yang buruk, jarak tempuh yang harus mereka lalui juga semakin bertambah jauh. Sehingga jika hujan turun atau air laut sedang pasang, sebagian anak-anak pun enggan bersekolah. Namun jika beruntung, para siswa ini bisa menumpang ketinting milik orang tua mereka yang berangkat melaut meskipun hal itu jarang mereka temui.

Awi, siswa kelas 4 SD 001 Sebatik ini mengaku terpaksa menempuh perjalanan hingga lebih dari 8 kilometer ke sekolah. "Lewat jalan setapak, baru sampai jalan besar terus ke sekolah. Lebih jauh, kalau hujan lebih susah jalannya. Lebih dekat kalau lewat pantai," ujarnya.

Meski telah bangun sejak subuh untuk bersiap berangkat sekolah, namun lebih dari 20 siswa SD 001 dari Sungai Batang ini biasanya akan sampai di sekolah sekitar pukul 08:00 Wita. Itupun jika kondisi laut sedang surut.

Chaerudin salah satu guru yang juga wali kelas 5 di SD 001 Sebatik ini mengetahui betul kondisi anak-anak tersebut. Dia mengaku pihak sekolah pun memahami kondisi siswa yang harus berjalan hingga belasan kilometer tersebut.

"Kalau mereka sampai di sekolah, ya sudah masuk. Tapi pihak sekolah memahami kalau rumah mereka ini jauh dan harus jalan kaki," katanya.

Jalan kaki dengan menyusuri sepanjang pantai wilayah Sebatik yang menghadap ke laut Sulawesi sepanjang 7 kilometer bukannya tanpa bahaya yang mengancam. Nursida siswi kelas 6 SD ini mengaku sering mendapati ular selama dalam perjalanan. Terkadang mereka juga bertemu dengan biawak atau anjing liar.

"Dari kampung Sungai Batang ada 21 anak. Kami masing masing berjalan berombongan. Masih ada lagi yang dibelakang, anak-anak laki laki biasanya agak belakang," ucapnya.

Hari/Tanggal : Minggu, 17 September 2017

Media : AntaraNews

Sumber : <https://www.antaraneews.com/berita/653189/warga-perbatasan-indonesia-malaysia-miliki-ktp-ganda>

Judul : **Warga perbatasan Indonesia - Malaysia miliki KTP ganda**

Rasa kekeluargaan warga Puring Kencana dengan negara tetangga sangat kental, khususnya untuk Suku Dayak Iban."

Putussibau, Kalbar (ANTARA News) - Hingga saat ini masih ada warga perbatasan Indonesia - Malaysia, Kecamatan Puring Kencana, Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda.

"Warga yang tinggal di betang (rumah panjang) masih ada yang memiliki KTP ganda, Indonesia dan Malaysia, terutama mereka yang lanjut usia," kata Camat Puring Kencana Hermanus Albinus kepada Antara, Minggu.

Meski pun dirinya belum pernah mendata, namun menurut Albinus warga yang memiliki KTP ganda kurang lebih seratusan kepala keluarga (KK), yang memang berkeluarga atau memiliki keluarga di Malaysia dan di Puring Kencana (Indonesia).

Dikatakan Albinus rata - rata penduduk di Kecamatan Puring Kencana merupakan Suku Dayak Iban, sehingga satu rumpun dengan negara tetangga itu.

"Apalagi warga Desa Langgau, sebagian dari mereka tidak memiliki paspor, namun begitu bebas keluar masuk Malaysia baik lewat jalan setapak maupun ketika ada keluarga mereka dari Malaysia yang datang ke wilayah Puring Kencana, Indonesia," jelas Albinus.

Atas kondisi tersebut, dirinya mengaku sudah sering melakukan sosialisasi ke masyarakat, namun kebiasaan warga setempat cukup sulit diubah terutama terkait dokumen kependudukan yang ganda itu.

"Rasa kekeluargaan warga Puring Kencana dengan negara tetangga sangat kental, khususnya untuk Suku Dayak Iban," kata dia.

Tidak bisa dipungkiri, kata Albinus ketergantungan warga perbatasan terhadap negara tetangga. Salah satu contoh warga di Puring Kencana menjual hasil kebunnya ke Malaysia, bahkan untuk sembako warga perbatasan masih ketergantungan dengan Malaysia.

"Jangankan KTP, untuk belanja saja warga perbatasan menggunakan dua mata uang yaitu rupiah dan ringgit," tutur Albinus.

Ia berharap dengan kondisi warga perbatasan menjadikan Pemerintah pusat

lebih fokus membangun di segala bidang untuk wilayah perbatasan khususnya di Puring Kencana.

"Tentu kita berharap pemerintah pusat tanggap dengan kondisi tersebut, banyak faktor yang membuat masyarakat masih ketergantungan dengan negara tetangga, salah satunya infrastruktur yang hingga saat ini masih dalam kondisi rusak berat," kata Albinus.

Hari/Tanggal : Kamis, 21 September 2017

Media : Kompas.com

Sumber :

<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/21/161303526/pembangunan-pltmg-10-mw-di-nunukan-terhambat-masalah-lahan>

Judul : **Pembangunan PLTMG 10 MW Di Nunukan Terhambat Masalah Lahan**



KOMPAS.com – Rencana pembanguna Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) oleh PT PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan bagian Timur di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara masih terganjal upaya hukum. Pasalnya, pemegang hak penguasaan lahan seluas 4,9 hektar mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Nunukan

terhadap besaran ganti rugi yang sudah diputuskan. Sebelumnya PN Nunukan tidak menerima keberatan Erdy Candian selaku pemohon yang keberatan terhadap besaran ganti rugi yang diajukan oleh tim appraisal. Erdy Candian kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan. Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah Pembangunan Dan Daerah TP4D Kejaksaan negeri Nunukan Ari Panca mengatakan, saat ini pihak PLN masih menunggu putusan kasasi yang diajukan oleh Erdy Candian. "Harga yang diajukan appraisal jauh diatas harga NJOP, tapi Erdy Cadian selaku pihak yang berhak atas tanah mengaku keberatan dan mengajukan keberatan ke pengadilan negeri Nunukan dan tidak menerima keberatan pemohon dan saat ini menunggu putusan kasasi," ujar Ari Panca, Rabu (20/09/2017). Ari menambahkan, pada awalnya proses penentuan harga ganti rugi oleh tim appraisal terhadap lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PLTMG Nunukan oleh PT PLN Unit Induk pembangunan Kalimantan bagian Timur seluas 4,9 hektar. Lokasinya terletak di Jl Laning Mansapa Kelurahan Nunukan Selatan. Harga ganti rugi telah disetujui oleh Jumadi selaku pemegang hak penguasaan lahan dan bersedia untuk menjual kepada PLN. Atas dasar surat pernyataan tersebut PLN kemudian membuat

teknis advis, bahkan mendapat rekomendasi dari Bupati Nunukan.

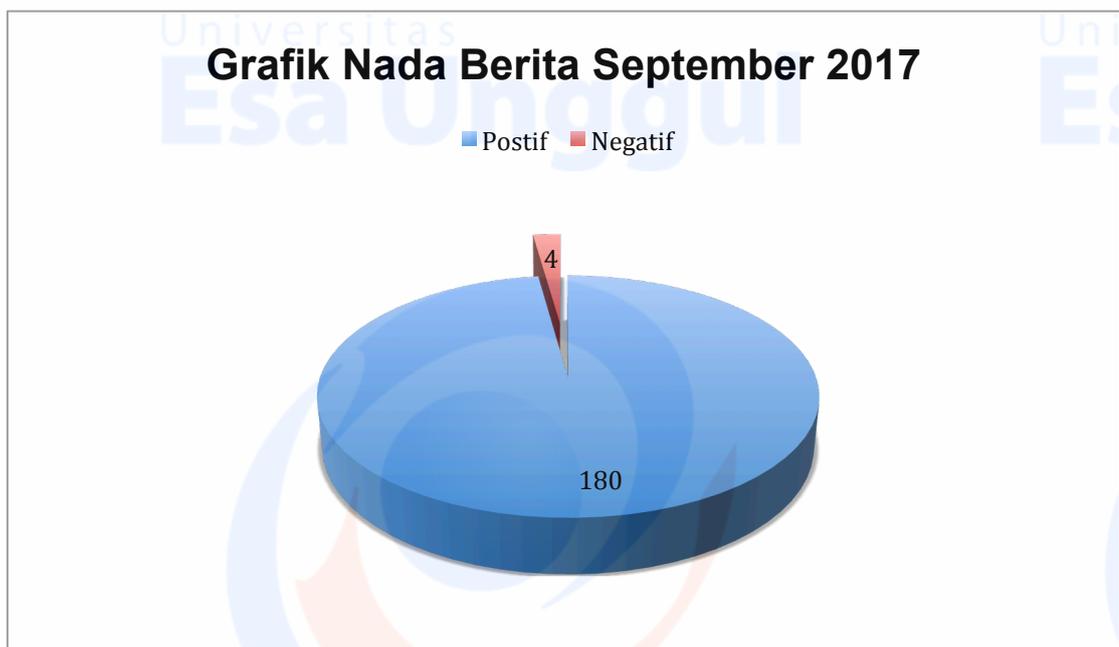
Dalam waktu menunggu proses perhitungan ganti rugi oleh Tim Appraisal, Jumadi menjual lahan tersebut kepada Erdy melalui notaris tanpa sepengetahuan lurah dan camat. “Bulan Agustus PLN keluar appraisalnya. Saat disampaikan ke Jumadi itu bukan tanah dia lagi,” imbuhnya. Saat tim appraisal menyampaikan penetapan harga rugi lahan kepada Erdy selaku pemegang hak penguasaan lahan yang merasa keberatan terhadap nilai yang diajukan tersebut. Sesuai aturan, PT PLN harus merujuk kepada harga yang telah ditetapkan oleh tim appraisal. Ari mengatakan, besaran ganti rugi yang telah ditetapkan oleh tim appraisal sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan, dimana tim appraisal sudah mendapat izin dari Kementerian Keuangan dan berlisensi dari BPN. Nilai yang ditetapkan oleh tim appraisal juga sudah jauh tinggi diatas nilai NJOP yang berlaku di daerah tersebut. Erdy selaku pemegang hak penguasaan lahan bahkan meminta ganti rugi 7 kali dari harga yang ditetapkan tim appraisal. Padahal, status tanah belum bersertifikat, hanya pemilikan surat keterangan pelepasan penguasaan tanah SKPPT.

Lampiran 2

Grafik Berita Sesuai Kategori Bulan September 2017



Grafik Nada Berita September 2017



Lampiran 3

Surat Keterangan Penerimaan Magang



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat - 10340
Telepon (021) 3142142, Fax. (021) 31924491, Website : www.bnpp.go.id

Jakarta, 22 Agustus 2017

Nomor : 42/ND/BHOK . III/VIII/2017
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penerimaan Mahasiswa Kuliah
Kerja Nyata Tahun 2017

Kepada
Yth Kepala Prodi S1 Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Esa Unggul
di -
Jakarta

Sehubungan surat Saudara Nomor 151/D-FIKOM/Ak.KKP/PR/VIII/2017, tanggal 8 Agustus 2017, perihal Kuliah Kerja Nyata, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Universitas Esa Unggul untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
2. Untuk kelancaran dan tertib dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kami melampirkan Surat Pernyataan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata untuk mohon ditandatangani dan diserahkan kembali pada saat mulai kegiatan.
3. Untuk koordinasi lebih lanjut terkait dengan waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, agar menghubungi Bagian Kepegawaian, pada Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP, dengan telp. (021) 3142142.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pt. KEPALA BIRO
HUKUM, ORGANISASI, DAN KEPEGAWAIAN


Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH, MH
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP.19710817 200212 1 001

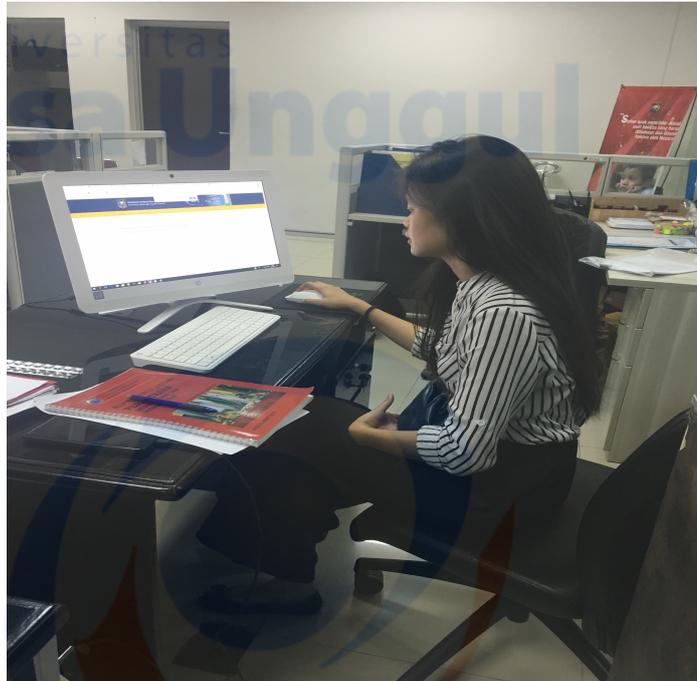
Lampiran 5

Sertifikat Telah Melaksanakan Magang

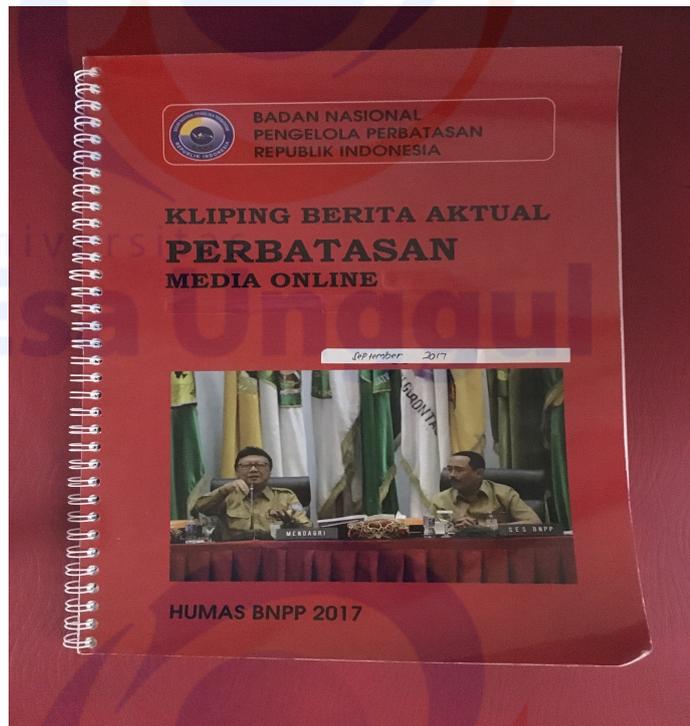


Lampiran 6

Melakukan Kegiatan Media Monitoring



Lembar Monitoring



Bersama Kepala Subbagian Humas dan Protokol
Bapak Os Ertanta Tarigan, S.STP



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



**L
A
M
P
I
R
A
N**